



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARJOKO
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 90501

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m²/150 m² di KLATEN, WARISAN Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m²/53 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 583.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.325.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 45.223.152



F. HARTA LAINNYA	Rp.	11.000.000
Sub Total	Rp.	1.472.548.152
III. HUTANG	Rp.	395.997.462
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.076.550.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.